

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan terkait dengan latar belakang masalah yang ada dilapangan yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan tesis.

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan negara yang demokratis adalah cita-cita besar bangsa Indonesia. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, berarti rakyatlah yang harus menjadi pusat gravitasi dari keseluruhan aktifitas politik yang berkaitan dengan pengaturan negara. Kemajuan praktek demokrasi disuatu negara ditandai dengan seberapa jauh rakyat dan aspirasi mereka menjadi perumusan kebijakan publik sekaligus referensi utama bagi setiap lembaga yang bertugas meramu kepentingan publik.

Wujud dari proses demokrasi di Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam proses pemilihan umum (pemilu). Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah hal mutlak. Berhasil tidaknya pemilu sangat bergantung pada suara mayoritas rakyat, karena suara rakyat ini yang akan menentukan nasib bangsa kedepan. Indonesia telah mengalami pasang surut dalam sistem pemilu. Pemilu pertama yang diadakan di Indonesia pada masa pemerintahan presiden soekarno, Pemilu yang diselenggarakan tahun 1955 ini menggunakan sistem multipartai dan

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dilaksanakan dengan dua tahap, tahap pertama untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua untuk memilih anggota konstituante. Pemilu tahun 1955 ini merupakan pemilu satu-satunya yang dilaksanakan oleh pemerintahan orde lama.

Pada awal masa pemerintahan orde baru, pemilu diadakan pada tahun 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik tetapi pada pemilu-pemilu berikutnya hanya diikuti oleh 3 partai politik yaitu Golongan karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PPP dan PDI adalah hasil gabungan partai politik yang dikalahkan oleh Golkar pada pemilu tahun 1971. Pada pemilu orde baru ini, rakyat hanya memilih partai politik dan kemudian partai politik yang akan mengutus wakilnya untuk duduk sebagai anggota MPR/DPR. Sedangkan presiden dan wakil dipilih oleh anggota MPR/DPR.

Setelah orde baru runtuh pemilu dilaksanakan pada tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Pada pemilu ini sistematisanya masih sama, rakyat hanya memilih partai politik dan kemudian partai politiklah yang akan memilih siapa-siapa saja yang akan duduk di kursi parlemen. Begitu pula dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota parlemenlah yang akan memilih.

Pada pemilu tahun 2004 terjadi perubahan dalam sistem pemilu, pemilu tahun 2004 yang lalu adalah pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelumnya pemilihan presiden dan wakil presiden dipercayakan kepada anggota MPR/DPR, sedangkan pada pemilu 2004 rakyatlah yang berdaulat memilih dan menentukan figur pemimpin negara

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilu pada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

untuk jangka lima tahun kedepan. Dengan begitu, presiden dan wakil presiden yang terpilih mempunyai basis legitimasi yang kuat dari rakyat, sekaligus menjadi amanah yang harus dipertanggung jawabkan pada rakyat.

Belajar dari keberhasilan pemilihan presiden dan wakil presiden yang berjalan dengan baik, aman dan damai serta bermodalkan niat dan itikad baik untuk menuju perubahan maka dilaksanakan pula pemilihan kepala daerah secara langsung yang lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dilaksanakan secara langsung setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi atas Undang-Undang No.22 Tahun 1999. Perubahan pemilihan kepala daerah yang tadinya tidak langsung (dipilih oleh DPRD) menjadi dipilih langsung oleh rakyat merupakan suatu kemajuan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui sebelumnya proses pemilihan kepala daerah dimonopoli oleh DPRD, sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Akan tetapi yang terjadi, kedaulatan rakyat tersebut disalahgunakan oleh anggota dewan terhormat yang duduk sebagai wakil rakyat. “kedaulatan rakyat “dikebiri” menjadi oligarki segelintir elite, yang kemudian menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Dengan adanya Pemilukada langsung maka politik oligarki tersebut akan hilang” (Romli, 2005:280). Dengan demikian, pemilihan langsung kepala daerah berpeluang memutus mata rantai oligarki partai yang mewarnai perpolitikan di DPRD. Selain itu Pemiludaka langsung merupakan wujud nyata asas

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

responsibilitas dan akuntabilitas. Pemilukada langsung lebih *accountable* dibandingkan sistem yang dulu digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui DPRD, melainkan dapat menentukan pilihannya berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Apabila kepala daerah terpilih ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat maka pemilihan berikutnya, kandidat yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali.

Memilih figur pemimpin negara ataupun daerah secara langsung merupakan momentum yang sangat krusial bagi suatu negara untuk itu harus dibarengi dengan tingginya tingkat partisipasi politik rakyat. Dalam hal ini partisipasi yang diinginkan bukan hanya sekedar menggunakan hak pilihnya tetapi yang terpenting bagaimana hak pilih tersebut dapat diimplementasikan dengan pilihan rasional dalam rangka memberikan yang terbaik untuk negara. Pelajar atau remaja adalah sebuah komunitas yang cukup besar dan cukup diperhitungkan sebagai basis suara pada setiap pemilu. Komunitas pelajar yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum disebut pemilih pemula atau pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia memilih. “Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-22 tahun, yang telah memiliki hak suara dalam pemilu dan terdiri atas pelajar, mahasiswa ataupun pekerja muda yang belum berusia 17 tahun tetapi telah menikah” (Chamim, 2003:13). Ada juga kalangan yang lebih longgar memberikan batasan bagi pemilih pemula, “yakni TNI/Polri yang baru pensiun dan kembali menjadi warga sipil yang memiliki hak memilih, juga dikategorikan sebagai pemilih pemula, karena seperti diketahui saat

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

menjadi anggota TNI/Polri, mereka tidak memiliki hak pilih dalam pemilu. Setelah mereka memasuki masa pensiun dalam usia tertentu, barulah mereka memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu” (KPU Provinsi DKI Jakarta, 2011: 4).

Pemilih pemula usia SMA memang menjadi segmen yang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu saja menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat. Sebenarnya pemilih pemula bisa ditempatkan sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat. Kondisi tersebut tampak jika merunut perilaku pemilih pemula pada beberapa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hasil jajak pendapat pasca-pemungutan suara (*exit poll*), pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (8 Agustus 2007), menunjukkan orangtua adalah yang paling memengaruhi pilihan para pemilih pemula. Teman dan saudara juga ikut memengaruhi namun dengan persentase yang lebih kecil” (Litbang Kompas, 2007).

Jumlah pemilih pemula di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Jumlah pemilih pemula yang ikut dalam pemilu 2009, berkisar sekitar 36 juta orang atau setara dengan 19-20% dari jumlah pemilih secara keseluruhan. Jumlah

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

ini sangat signifikan karena setara dengan 20% dari total jumlah kekuatan suara nasional. Menurut Lembaga survei Indonesia potensi yang dimiliki pemilih pemula dapat dicontohkan sebagai berikut:

1. Dengan 20% suara akan membuat suatu partai baru bisa lolos *electoral threshold* pada pemilu tahun 2004 yang lalu, sehingga bisa lolos pada pemilu 2009. Begitu pula dengan pemilu 2009, potensi 20% suara akan membawa ke pemilu berikutnya.
2. Dengan angka 20% itu juga bisa mencalonkan capres dan cawapres. Karena persyaratan mencalonkan capres dan cawapres itu hanya mendapatkan lima persen total suara DPRD nasional atau tiga persen kursi DPR secara nasional.
3. Dengan 20% suara, bisa menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Indonesia.

Dari data diatas menunjukkan pemilih pemula adalah komunitas yang memiliki potensi untuk menyumbang suara dalam pemilu atau PemiluKada, hanya saja haruslah diimbangi dengan sosialisasi pemilu sebagai salah satu cara memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, hal ini dikarenakan sebagai orang yang baru pertama kali pemilih rentan sekali dengan eksploitasi dari beberapa kelompok tertentu jika tidak mendapatkan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih yang cukup matang.

Pada dasarnya secara psikologis pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang tua pada umumnya. Misalnya kritis, mandiri,

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme PemiluKada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

independen, anti status quo atau tidak puas dengan keamanan, pro perubahan dan sebagainya. Karakteristik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu yakni pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Misalnya memilih karena integritasnya, *track record*-nya, atau program kerja yang ditawarkan. Karena belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilu, pada umumnya banyak dari kalangan pemilih pemula yang belum mengetahui berbagai hal yang terkait dengan pemilihan umum. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang menjadi peserta pemilu, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta pemilu, siapa saja yang boleh memilih dalam pemilu, apa itu politik dan sebagainya. Pemilih pemula juga tidak tahu bahwa suaranya sangat berarti bagi proses politik di negaranya. Bahkan tidak jarang pemilih pemula enggan berpartisipasi dalam pemilu dan memilih untuk ikut-ikutan tidak mau menggunakan hak pilihnya atau memilih menjadi golongan putih (golput).

Fakta maraknya pemilih pemula yang enggan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan temuan Lembaga Peduli Remaja (LPR) Kriya Mandiri Solo yang melakukan jejak pendapat pada pemilih pemula di kota Solo tanggal 19 Februari 2009. Menurut survei LPR Potensi golput pemilih pemula di Solo cukup tinggi. Dari 340 responden yang dipilih secara acak dari sepuluh SMA dan SMK di Solo hanya 21,49% saja yang menyatakan siap memberikan suara. Sisanya 60,51% menyatakan belum yakin apakah akan memilih atau tidak, artinya berpotensi golput dan 18 % dengan tegas menyatakan tidak memilih.

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Hasil survei lainnya juga pada pemilu tahun 2009 menunjukkan 67,55% pemilih pemula belum mengetahui secara persis tahapan dan sistem pemilu. Tidak hanya itu, sebanyak 76,40% bahkan mengaku tidak mengetahui jumlah kontestan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan pemilih pemula pada pemilu 2009 lalu masih sangat rendah. Sikap ini terlihat dari 91,01% responden menyatakan tidak bersedia turut serta dalam kegiatan kampanye (KPU Provinsi DKI Jakarta, 2011:8).

Merujuk dari data survei diatas, sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih pemula merupakan keniscayaan dan tidak bisa dihindari guna meningkatkan melek politik pemilih pemula. Sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih pemula disekolah sudah terintegrasi dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut Tim ICCE UIN Jakarta: “Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy and political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional”. Dalam hal ini guru PKn hanya tinggal melakukan pengembangan metode atau model pembelajaran yang tepat sasaran agar pendidikan politik bagi pemilih pemula memiliki nilai kebermaknaan yang tinggi, karena pada dasarnya siswa adalah warganegara hipotetik, yakni warga negara yang “belum jadi” oleh sebab itu masih harus dididik menjadi warganegara yang dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya (Budimansyah, 2007:11).

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Materi tentang kepemiluan dalam mata pelajaran PKN belum cukup untuk memberikan informasi utuh pada pemilih pemula karena materi yang disampaikan tidak secara spesifik dan mendetail membahas tentang pemilu dan sistemnya. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu berkewajiban memberikan sosialisasi pemilu sebagai bagian dari pendidikan pemilih, hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam peraturan tersebut menyebutkan KPU memiliki wewenang untuk melakukan sosialisasi pemilu dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemilih tentang pemilihan umum dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula saat ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan berbagai hal tentang pemilu seperti sistemnya, tahapannya, dan lembaga penyelenggaranya tetapi lebih dari itu terkait juga dengan arti penting pemilu bagi bangsa dan negara, untuk itu muatan dalam sosialisasi pemilu sebagai bagian dari pendidikan pemilih harus dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang utuh. “Kompetensi kewarganegaraan adalah seperangkat pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara” (Branson, 1999:8-9). Kompetensi ini nantinya akan memberi bekal

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilu Pada Pemula Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kepada setiap pemilih pemula agar menjadi warganegara cerdas dan baik (*be smart and good citizenship*).

Tiga kompetensi penting yang harus dimiliki oleh pemilih pemula adalah kompetensi kewarganegaraan yang diadopsi dari pendapat Branson (1999:8) yaitu:

1. *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh pemilih pemula
2. *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris pemilih pemula yang relevan; dan
3. *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Sosialisasi pemilu sebagai proses pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan saat ini merupakan suatu kebutuhan dasar bagi pemilih pemula. hal ini penting karena dengan kompetensi kewarganegaraan yang mapan pemilih pemula dapat mempertimbangkan sisi kualitas calon yang akan dipilih. Sebab pemilu menggunakan sistem proposional terbuka yang mengharuskan calon pemilih mencoblos tanda calon yang ikut serta dalam Pemilukada. Pilihan-pilihan pemilu sekarang ini tidak bisa lagi memilih “kucing dalam karung”, tetapi harus benar-benar berdasarkan suara hati nurani dan pilihan rasionalnya. Dengan begitu pimpinan negara atau daerah yang dihasilkan adalah mereka yang benar-benar berintegritas, berkualitas, jujur, amanah dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis yang timbul dari kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, mengajak pemilih pemula tidak hanya tahu tentang bagaimana memilih, tetapi juga membangun kesadaran dan daya kritis terhadap setiap tahapan proses pemilu. Dengan begitu, pemilih pemula tidak lagi menjadi objek dalam pemilu, tetapi sebaliknya mereka bisa menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik, sekaligus menjadi pendorong pendewasaan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat banyak, bukan kepentingan orang per-orang, sehingga hal ini mampu menumbuhkan iklim demokrasi di Indonesia.

Disisi lain Pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, juga bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengeliminasi konflik massa dalam proses pemilu. Perlu diingat, polarisasi masyarakat Indonesia yang terkotak-kotak dalam politik aliran masih menjadi gejala yang memprihatinkan. Dalam situasi menjelang pemilu, polarisasi tersebut bisa mengeras menjadi kekerasan yang massif, terutama pada masa kampanye pemilu. Pendukung fanatik sebuah partai politik akan sangat mudah bersinggungan dan berbenturan dengan pendukung fanatik partai politik yang lain, sehingga akan dengan mudah menyulut konflik massa di tingkat *grass-root*, apalagi jika provokasi oleh kepentingan politik tertentu pada masa menjelang pemilu. Oleh karena itu, pemilih pemula harus terus dibentuk dan dikembangkan kompetensi kewarganegaraannya agar sadar bahwa pemilu adalah salah satu proses pembangunan demokrasi. Sikap saling

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

menghormati, toleran dan menghargai hak pilih orang lain harus dibangun dan diinternalisasi dalam diri setiap individu sebagai calon pemilih. Kalah dan menang dalam pemilu adalah sesuatu yang wajar dan biasa, hal itu harus menjadi kesadaran bersama seluruh komponen masyarakat.

Keniscayaan pemilu yang demokratis (*luber dan jurdil*) untuk melahirkan pemimpin nasional, daerah dan wakil-wakil rakyat yang aspiratif, *capable* dan *acceptable* merupakan agenda besar bangsa ini. Oleh karena itu, pemilih pemula harus benar-benar dipersiapkan untuk menjadi masyarakat politik yang cerdas, rasional, dan paham akan hak-hak sipil yang dimilikinya, sehingga pilihan mereka pada pemilu mendatang merupakan pilihan sadar, rasional, argumentatif, bebas intimidasi dan berani dipertanggungjawabkan. Disinilah pentingnya sosialisasi pemilu sebagai bagian dari pendidikan pemilih dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan yang utuh bagi pemilih pemula.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka penulis merasa perlu untuk merumuskan apa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi persoalan inti dan sekaligus menjadi fokus telaah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sosialisasi peraturan dan mekanisme Pemilukada oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan pemilih pemula?

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Untuk memperjelas permasalahan tersebut, maka masalah pokok dapat dijabarkan menjadi sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakan KPU Provinsi DKI Jakarta kepada pemilih pemula?
2. Bagaimana hasil sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakan KPU Provinsi DKI Jakarta kepada pemilih pemula?
3. Kendala apa saja yang dihadapi KPU Provinsi DKI Jakarta dalam sosialisasi Pemilukada kepada pemilih pemula?
4. Bagaimana upaya KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kendala-kendala dalam sosialisasi Pemilukada kepada pemilih pemula?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai sosialisasi peraturan dan mekanisme Pemilukada oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan pemilih pemula. Sementara itu tujuan khusus penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakan KPU Provinsi DKI Jakarta kepada pemilih pemula.
2. Untuk mengetahui hasil sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakan KPU Provinsi DKI Jakarta kepada pemilih pemula.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi KPU Provinsi DKI Jakarta dalam sosialisasi Pemilukada kepada pemilih pemula

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

4. Untuk mengetahui upaya KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kendala-kendala dalam sosialisasi Pemilukada kepada pemilih pemula.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara keilmuan (teoretik) maupun secara empirik (praktis). Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretik :

Secara akademis (keilmuan) diharapkan penelitian tentang sosialisasi peraturan dan mekanisme Pemilukada oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan pemilih pemula dapat menjadi tambahan referensi untuk mengkaji dan merumuskan ilmu pengetahuan tentang sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih sebagai upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis :

- a. Para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan sebagai bahan kontribusi ke arah pengembangan kompetensi kewarganegaraan
- b. Para pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih pemula
- c. Memberi gambaran kepada partai politik agar memberikan pendidikan politik yang efektif bagi pemilih pemula

E. STRUKTUR ORGANISASI PENULISAN

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Tesis yang nantinya akan dikembangkan terdiri dari 5 bab, yakni: (1) bab pendahuluan, (2) tinjauan pustaka, (3) metodologi penelitian, (4) hasil penelitian dan pembahasan serta (5) kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab pendahuluan secara rinci mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Pada bab selanjutnya tinjauan pustaka berisikan tentang sosialisasi politik yang terdiri dari pengertian sosialisasi dan sosialisasi politik, komunitas, kelompok sosial dan sosialisasi politik, agen sosialisasi politik dan mekanisme sosialisasi politik. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu tentang pemilihan umum kepala daerah yang terdiri dari dasar hukum pemilihan kepala daerah, asas-asas pemilihan umum kepala daerah, komisi pemilihan umum dan sosialisasi pemilu. kemudian dilanjutkan dengan kompetensi kewarganegaraan yang terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan watak kewarganegaraan. Selanjutnya tipologi pemilih, melek politik dan penelitian terdahulu. Di bagian akhir ditutup dengan paradigma penelitian.

Bab berikutnya merupakan metodologi penelitian yang mencakup lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi oprasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan temuan penelitian serta tahap-tahap pelaksanaan penelitian di lapangan. Pada bab selanjutnya yaitu bab tentang hasil dan pembahasan yang mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Bab terakhir merupakan bab kesimpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan penelitian.



Yulia Adhani, 2012

Sosialisasi Peraturan Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula

: Studi Kasus Sosialisasi Politik pada KPU Provinsi DKI Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu